

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007. *Seri Bunga Rampai: Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Coryanata, Isma, 2007, *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Universitas Bengkulu, SNA X.
- Erlangga, Putra, 2004, *Sasaran Perwujudan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)* , Yogyakarta, Modul.
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit-UNDIP.
- Ghozali, Imam, 2009, *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit-UNDIP.
- Indra Bastian. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Airlangga.
- Isharyanto, 2007. *Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Anggaran Daerah*
- Junaedi, 2008, *Ekonometrika*, Universitas Jambi, Modul
- Madiasmo, 2001, *Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Penerbit Andy. Yogyakarta.
- Madiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andy .Yogyakarta.
- Mulyanto, 2008, *Tinjauan Penyusunan KUA, PPAS dan RKA-SKPD: Beberapa Pokok Pemikiran Awal*, Service Provider, LGSP.
- Musthofa, Chabib, 2004, *Metode Penelitian Kuantitatif, _* , Modul.
- Nur, muchamad, 2011, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan Tentang anggaran Terhadap Penyusunan APBD (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Sukoharjo JawaTengah)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi.
- Nunnally, 1967, *Psycometric Theory*, McGraw-Hill, New York.

- Paulus, Pratiwa, 2006, *Transparansi Untuk Siapa?*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Pramita, Yulinda dan Andriyani, Lilik, 2010, *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)*. Universitas Muhammadiyah Magelang, SNA XII.
- Roseptalia, Rima, 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik*. UII, Skripsi.
- Sardjito, Bambang dan Mothaheer, Osmad, 2007, *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*, SNA X.
- Sopannah, 2009. *Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD*, Universitas Widyagama Malang, SNA XII.
- Sopannah dan Whayudi, Isa, 2008, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Malang Corruption Watch (MCW), SNA XIII.
- Sulistoni, G., 2003, *Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, SOMASI, Nusa Tenggara Barat.
- United Nations Development Program (UNDP), 2007. *Local Governance Support Program (LGSP) For Good Governance*, Jakarta, Dokumen bahan ajar.
- USAID (United States Agency for International Development), 2007, *Local Governance Support Program (LGSP) USAID*, Jakarta, Bahan ajar.
- Werimon, Ghozali dan Nazir, 2007, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua)*, SNA X.
- Winarna, Jaka dan Murni, Sri, 2007, *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. Universitas Sebelas Maret, SNA X.

Witono, Banu. 2003. *Pengaruh Personal Background dan Political Culture terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Empirika Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol. 16 : 26-41.

Yuwono, Sony,dkk 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Edisi pertama,. Jawa Timur Bayumedia.

Zainuddin dkk., *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.